

Industri *Beauty Pageant* sebagai Proksi Konflik Thailand-Kamboja dan Implikasinya terhadap Komunitas Regional Asia Tenggara

Yoga Ramadhani¹, Wishnu Mahendra Wiswayana²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
E-mail: yogacuteboy@student.ub.ac.id¹, wishnu.mahendra@ub.ac.id²

Article History:

Received: 06 Oktober 2025

Revised: 11 November 2025

Accepted: 27 November 2025

Kata Kunci: *Beauty Pageant*;
Konflik Proksi; Thailand-
Kamboja; Identitas Budaya;
The ASEAN Way

Abstrak: Artikel ini mengkaji eskalasi ketegangan historis antara Thailand dan Kamboja ke dalam arena keamanan non-tradisional, khususnya industri *beauty pageant*. Energi konflik dari sengketa teritorial yang tidak terselesaikan di ranah politik ini menemukan salurannya di panggung budaya populer, mengubahnya menjadi perang proksi di ranah sosio-kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika perseteruan di panggung kontes kecantikan berfungsi sebagai proksi dari konflik identitas yang belum terselesaikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang berfokus pada kontroversi terkini, kerangka Onion Analogy dari Simon Fisher diterapkan sebagai alat analisis utama untuk membedah tiap lapisan konflik mulai dari *positions*, *interests*, hingga *needs fundamental* kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perseteruan ini merupakan manifestasi dari kebutuhan mendasar kedua negara atas keamanan, martabat nasional, dan kedaulatan budaya. Fenomena ini mengekspos keterbatasan diplomasi regional tradisional seperti "*The ASEAN Way*" dalam mengelola sengketa berbasis identitas yang diperkuat oleh nasionalisme digital, serta menggarisbawahi pentingnya ranah budaya sebagai medan konflik yang signifikan dalam studi keamanan Asia Tenggara.

PENDAHULUAN

Konflik internasional di abad ke-21 semakin menunjukkan pergeseran arena dari medan pertempuran fisik ke ranah sosio-kultural. Salah satu contoh paling aktual dari fenomena ini adalah konflik historis antara Kerajaan Thailand dan Kerajaan Kamboja, yang berakar dari sengketa teritorial atas Kuil Preah Vihear yang telah berlangsung lebih dari satu abad, antagonisme antara kedua negara tidak pernah benar-benar padam, melainkan bertransformasi (Rosdalina, 2025). Energi konflik yang tidak terselesaikan di ranah politik tingkat tinggi (*high politics*) kini menemukan salurannya di panggung budaya populer, di mana klaim atas sehelai busana tradisional hingga mahkota ratu kecantikan dapat memantik kemarahan nasional (English, 2025; Horng, 2025). Arena *beauty pageant*, dengan jangkauan global dan basis penggemar yang fanatik di Asia Tenggara, telah menjadi proksi yang sempurna untuk perseteruan ini (Suwardi,

2019).

Pada tahun 2025, ketegangan yang telah lama terpendam antara Thailand dan Kamboja kembali memanas dengan eskalasi yang signifikan. Pada Juli 2025, kekerasan meletus di kawasan perbatasan yang disengketakan, mengakibatkan setidaknya 11 orang tewas dan sejumlah warga sipil lainnya terluka dalam pertempuran yang melibatkan senjata berat dan serangan udara (Rosdalina, 2025). Konflik ini dimulai dengan ketegangan yang meningkat pada Februari 2025, saat tentara Kamboja diiringi oleh warga sipil menyanyikan lagu kebangsaan di Kuil Prasat Ta Moan Thon, yang dianggap oleh pihak Thailand sebagai pelanggaran protokol perbatasan. Ketegangan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya, dengan pertempuran mematikan yang terjadi pada Mei dan Juni 2025 di Segitiga Zamrud yang disengketakan (Rosdalina, 2025).

Pada 24 Juli 2025, ledakan kekerasan memuncak ketika kedua negara saling menyerang di sepanjang perbatasan, mengakibatkan kematian dan cedera di kedua belah pihak, serta meningkatkan ketegangan diplomatik (Rosdalina, 2025). Eskalasi ini menjadi sangat urgen karena tidak hanya memperburuk hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja, tetapi juga menciptakan potensi ancaman terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara, di mana ketegangan sosio-kultural yang diperburuk oleh nasionalisme digital dapat memperburuk ketegangan yang sudah ada. Selain itu, ketegangan ini semakin sulit untuk diredakan melalui jalur diplomatik formal seperti yang ditunjukkan oleh kegagalan pertemuan pada Juni 2025 (Rosdalina, 2025).

Fenomena ini menggarisbawahi adanya celah dalam literatur studi keamanan kawasan yang selama ini cenderung berfokus pada sengketa teritorial dan mekanisme diplomasi formal, seringkali mengabaikan ranah budaya sebagai medan konflik yang signifikan. Konflik yang semula berfokus pada sengketa teritorial dan klaim warisan budaya ini telah tereskalasi ke ranah *beauty pageant*, menciptakan arena baru bagi persaingan simbolik yang mengancam kestabilan hubungan kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana dinamika perseteruan di ranah *beauty pageant* ini berfungsi sebagai proksi untuk konflik Thailand-Kamboja sehingga *output* penelitian ini dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog, mediasi, atau negosiasi guna meredakan ketegangan melalui analisis dari berbagai lapisan konflik. Penelitian ini mengajukan tesis bahwa perseteruan di panggung *beauty pageant* berfungsi sebagai proksi untuk konflik teritorial dan identitas yang belum terselesaikan tersebut.

STUDI PUSTAKA

Sengketa antara Thailand-Kamboja atas Kuil Preah Vihear ini berakar pada demarkasi perbatasan yang tidak jelas selama periode kolonial Perancis dan interpretasi yang berbeda atas Perjanjian Prancis-Siam tahun 1904-1907. Peta *Annex I* dari perjanjian tersebut, yang menurut Kamboja dengan jelas menempatkan kuil di dalam wilayahnya, menjadi dasar klaimnya (Ciorciari, 2014). Momen penting dalam sengketa ini adalah putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1962, yang memberikan kedaulatan atas kuil tersebut kepada Kamboja. Namun, Thailand tidak pernah sepenuhnya menerima putusan ini, terutama terkait wilayah seluas 4,6 km² di sekitar kuil, yang dibiarkan tidak terselesaikan (Elfia, 2014). Ketidakjelasan inilah yang menjadi sumber ketegangan yang terus-menerus.

Konflik ini kembali memanas secara dramatis pada tahun 2008 ketika UNESCO menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia milik Kamboja (Elfia, 2014). Keputusan ini memicu protes keras dari kelompok nasionalis di Thailand dan menyebabkan bentrokan militer di perbatasan, menandai eskalasi paling serius dalam beberapa dekade. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana simbol warisan budaya dapat menjadi pemicu konflik bersenjata ketika terkait dengan kedaulatan dan kebanggaan nasional. Kondisi terkini pun masih

saja bergejolak, pasalnya pada 24 Juli 2025 kekerasan yang melibatkan senjata berat dan serangan udara mengharuskan Kamboja untuk mengambil langkah berani dengan menarik staf diplomatiknya di Thailand (Rosdalina, 2025).

Dalam upayanya menghadapi situasi tersebut, ASEAN memainkan peran krusial terutama selama eskalasi tahun 2008-2011. Mekanisme yang digunakan berakar pada "*The ASEAN Way*" yang merupakan sebuah pendekatan yang mengutamakan non-intervensi, konsultasi (musyawarah), dan konsensus (mufakat) (Elfia, 2014). Prinsip-prinsip ini diabadikan dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), yang menjadi dasar bagi upaya mediasi. Selama krisis, Indonesia, sebagai ketua ASEAN pada tahun 2011, memimpin upaya diplomatik yang aktif, termasuk "*shuttle diplomacy*" antara Phnom Penh dan Bangkok (Elfia, 2014). Upaya ini berhasil memfasilitasi dialog dan menghasilkan kesepakatan untuk gencatan senjata permanen dan penempatan tim pemantau dari Indonesia di zona demiliterisasi. Hal ini menunjukkan kapasitas ASEAN dalam manajemen krisis dan pencegahan eskalasi perang skala penuh antara negara-negara anggotanya.

Namun, peran ASEAN juga menunjukkan batasannya. Prinsip non-intervensi sering kali dianggap sebagai "faktor penghambat" yang mencegah organisasi mengambil tindakan yang lebih tegas. Kegagalan untuk mengadakan pertemuan Dewan Tinggi TAC atau membentuk pasukan penjaga perdamaian permanen menunjukkan keengganan negara-negara anggota untuk menyerahkan kedaulatan mereka pada mekanisme regional, terutama dalam sengketa yang sensitif (Elfia, 2014). Akibatnya, ASEAN lebih efektif dalam manajemen konflik (menghentikan kekerasan) daripada resolusi konflik (mengatasi akar penyebab).

Pendekatan "*The ASEAN Way*" yang mengutamakan keharmonisan dan menghindari konfrontasi langsung menciptakan *gap* dalam penyelesaian konflik formal. Ketegangan yang tak terselesaikan kemudian mencari saluran alternatif, seperti media sosial dan *beauty pageant* internasional, yang menjadi arena ekspresi ketegangan tersebut. Meskipun bertujuan menjaga perdamaian, prinsip ini justru memungkinkan konflik berkembang di ranah budaya, memperburuk perpecahan sosial dan mengancam visi ASEAN dalam membangun "*Socio-Cultural Community*." Dalam konteks hubungan antarnegara yang semakin terintegrasi dan dibatasi oleh norma diplomatik yang menghindari konfrontasi langsung, seperti "*The ASEAN Way*" konflik proksi perlu diperluas untuk mencakup domain non-militer. Penelitian ini mengusulkan bahwa persaingan antarnegara yang intens, ketika tidak dapat disalurkan melalui agresi militer, akan berpindah ke arena budaya dan sosial.

Industri *beauty pageant*, dengan *platform* globalnya, basis penggemar yang penuh gairah, dan nasionalisme yang eksplisit, menjadi contoh utama arena proksi budaya. Di panggung ini, keluhan historis dan sengketa kedaulatan diperjuangkan bukan dengan tentara, melainkan dengan mahkota, kostum, dan retorika di sosial media. Ironi yang mendalam dari slogan Miss Grand International (MGI) "*Stop the War and Violence*" menjadi titik masuk yang kuat untuk analisis ini (Miss Grand International Organization, 2025). Slogan yang dirancang untuk mempromosikan perdamaian, kesepahaman, kasih sayang, dan nir-kekerasan, justru menjadi latar belakang di mana persaingan nasionalistik dipentaskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Fokus utama adalah pada serangkaian kontroversi budaya dan *beauty pageant* antara Thailand dan Kamboja yang terjadi pada tahun 2025. Studi kasus ini dipilih karena merepresentasikan secara jelas bagaimana sengketa historis bertransformasi ke dalam arena non-tradisional. Sumber data yang

digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik studi literatur dan analisis konten digital. Teknik analisis data dilakukan dengan menerapkan *framework* berupa *Onion Analogy* dari Simon Fisher secara sistematis. *Framework* ini digunakan sebagai alat bantu untuk "mengupas" lapisan-lapisan konflik. Data yang terkumpul diorganisir dan dikategorikan ke dalam tiga lapisan analisis, yakni *positions* (tuntutan publik), *interests* (tujuan strategis), dan *needs* (syarat fundamental), dari kedua belah pihak (Fisher et al., 2007). Analisis ini bertujuan guna mengungkap motivasi dan kebutuhan mendasar yang mendorong eskalasi konflik di arena budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Industri *Beauty Pageant* sebagai Bukti Eskalasi dan Proksi Konflik

Eskalasi konflik budaya antara Thailand dan Kamboja termanifestasi dalam setidaknya dua arena utama, yakni klaim warisan budaya di forum internasional kontroversi di dalam industri *beauty pageant*. Salah satu insiden pentingnya adalah rencana Thailand untuk mendaftarkan pakaian tradisional *Chut Thai* ke UNESCO, yang memicu reaksi dari Kamboja yang merasa memiliki warisan serupa dan menuduh Thailand melakukan klaim eksklusif (The Nation, 2025b). Arena yang lebih panas adalah industri *beauty pageant* yang menjadi proksi atas konflik teritorial dan identitas budaya ini. Bentuk proksi ini terlihat terutama yang melibatkan organisasi Miss Grand International (MGI) milik Thailand. Kontroversi bermula ketika MGI membatalkan status Kamboja sebagai tuan rumah bersama MGI 2024 dengan alasan "tidak profesional" dan konflik bisnis (English, 2025; Malai, 2024). Meskipun kedua belah pihak, yakni Miss Grand Cambodia Organization dan MGI Organization, menyatakan bahwa masalah ini semata-mata terkait dengan persoalan bisnis, kenyataannya ketegangan ini semakin memperburuk hubungan bilateral yang sudah lama tegang.

Pada 8 Oktober, Kementerian Pariwisata Kamboja mengeluarkan pernyataan untuk membantah klaim yang disebutkan oleh The Nation Thailand di halaman Facebook mereka (Ousa, 2024). Media tersebut mengklaim bahwa salah satu alasan pembatalan MGI 2024 di Kamboja adalah ketidakhadiran menteri dalam konferensi pers yang dijanjikan. Namun, pernyataan kementerian menegaskan bahwa Menteri Pariwisata Kamboja tidak pernah berjanji untuk menghadiri konferensi pers atau acara lainnya selain pertemuan yang diadakan pada 6 Oktober (Ousa, 2024). Kementerian Pariwisata juga meminta The Nation Thailand untuk mengoreksi pernyataan mereka dan berhenti menyebarkan informasi yang salah yang merusak reputasi kementerian tersebut. Pernyataan ini semakin memperjelas bahwa meskipun perselisihan ini dilabeli sebagai masalah bisnis, di baliknya terdapat lapisan konflik yang lebih dalam, menunjukkan ketegangan yang telah mengakar kuat antara Thailand dan Kamboja. Konflik yang berawal dari sengketa teritorial dan klaim warisan budaya ini, kini meluas ke ranah yang lebih luas, termasuk budaya populer dan sektor hiburan, yang memperburuk ketegangan di antara kedua negara.

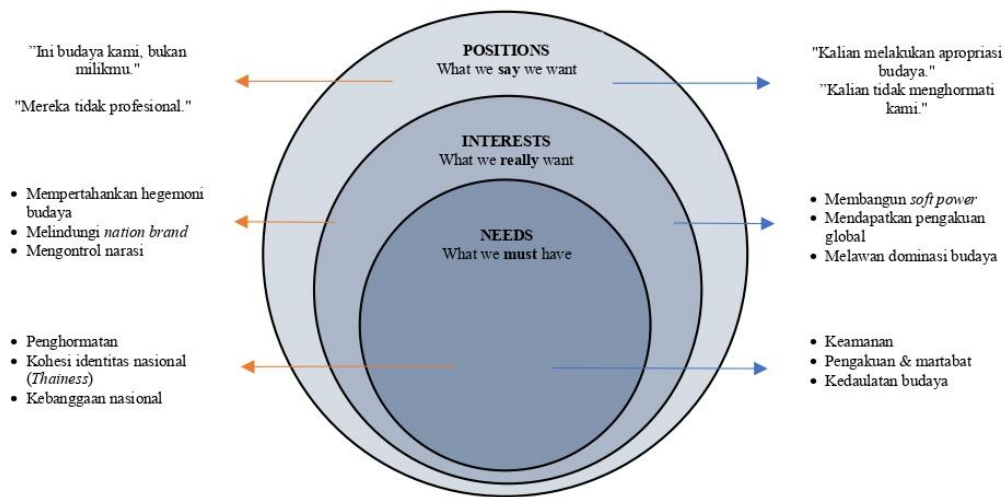
Insiden ini kemudian mencapai puncaknya yang ditandai dengan pencabutan gelar Pich Votey Saravody, perwakilan Kamboja sekaligus peraih *5th Runner-up* di MGI 2022 (Thai PBS World, 2025), setelah ia menyuarakan dukungan patriotik untuk negaranya di tengah ketegangan perbatasan yang memanas (Horng, 2025). Tindakan ini, yang dilakukan oleh organisasi MGI pimpinan Nawat Itsaragrisil dari Thailand, mengirimkan pesan yang jelas bahwa sentimen nasionalis tidak akan ditoleransi, yang oleh pihak Kamboja ditafsirkan sebagai pembungkaman dan hukuman atas patriotisme (Horng, 2025). Rentetan peristiwa ini menunjukkan bagaimana konflik teritorial dan identitas budaya yang telah lama ada, dengan cepat menjalar ke dalam arena yang awalnya tidak terkait, yakni *beauty pageant*. *Beauty pageant*, yang seharusnya menjadi

panggung budaya global, justru bertransformasi menjadi medan pertempuran simbolis untuk kedaulatan dan martabat nasional antara kedua negara.

B. Analisis Konflik Thailand-Kamboja melalui *Onion Analogy Framework*

Dengan menerapkan *Onion Analogy Framework* oleh Fisher et al. (2007), dinamika konflik ini dapat dibedah sesuai **Gambar 1**.

Gambar 1. Konflik Thailand-Kamboja dalam *Onion Analogy Framework*

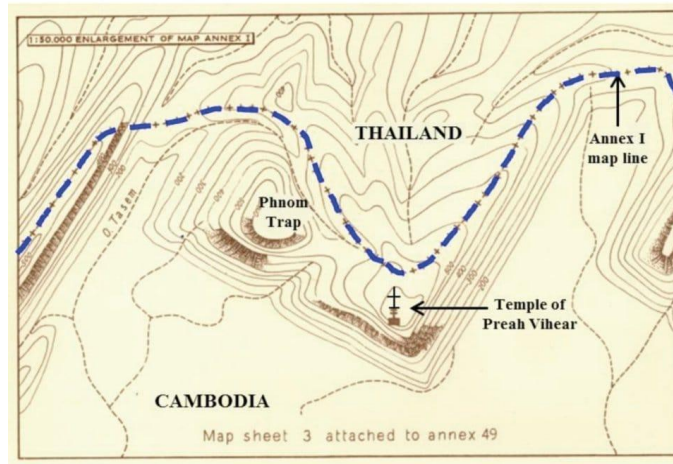


Sumber: Diolah Peneliti dari berbagai Literatur

Lapisan *Positions* adalah tuntutan publik yang kaku dan saling menuduh, yang paling terlihat di media sosial dan pernyataan resmi. Posisi Thailand termanifestasi dalam pernyataan seperti, "Kamboja meniru budaya kami," (Prachatai, 2024) dan tindakan MGI yang menyatakan, "Penyelenggara Kamboja tidak profesional dan kontestan yang tidak loyal harus dihukum" (Malai, 2024). Sebaliknya, posisi Kamboja adalah, "Thailand melakukan apropriasi budaya Khmer," (Prachatai, 2024) dan "MGI tidak menghormati serta mendiskriminasi kami" (Malai, 2024). Posisi-posisi ini diperkuat oleh "*fans war*" di media sosial, yang menciptakan narasi hitam-putih dan melabeli satu sama lain dengan julukan seperti "*Claimbodia*" (Prachatai, 2024).

Di balik posisi tersebut, terdapat lapisan *Interest* strategis yang lebih dalam bagi kedua negara. Kepentingan Thailand adalah mempertahankan hegemoni budayanya di kawasan, melindungi aset ekonomi vital dari pariwisata dan industri kreatif yang sangat bergantung pada promosi budaya (Prachatai, 2024), serta mengontrol narasi di panggung internasional melalui *platform* yang dimilikinya seperti MGI (Miss Grand International Organization, 2025). Kepentingan Kamboja adalah membangun *soft power* dan citra nasional yang positif pasca-konflik, mendapatkan pengakuan internasional atas warisan Kekaisaran Khmer yang adiluhung, terutama Kuil Preah Vihear yang diklaim atas dasar Perjanjian Prancis-Siam tahun 1904-1907. Di mana Peta *Annex I* (lihat **Gambar 2.**) dari perjanjian tersebut, menempatkan kuil di dalam wilayahnya (Ciorciari, 2014). Kepentingan lainnya adalah melawan apa yang dirasakan sebagai dominasi budaya dari tetangganya yang lebih besar dan lebih kuat secara ekonomi.

Gambar 2. Bagian yang Diperbesar dari Peta Annex I



Sumber: *Counter-Memorial of the Royal Government of Thailand, Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thai.)*, [1962] 1 ICJ Pleadings, Annex 49, map sheet 3 (Sept. 8, 1961) dalam Ciorciari, 2014

Pada lapisan *Needs*, konflik ini digerakkan oleh kebutuhan psikologis fundamental yang terancam. Kebutuhan Kamboja yang paling mendasar adalah keamanan ontologis (rasa aman dalam identitas), pengakuan atas kedaulatan budayanya, serta kesetaraan dan martabat nasional. Tuduhan "tidak profesional" atau pencabutan gelar karena patriotisme dirasakan sebagai serangan langsung terhadap martabat bangsa, memicu reaksi emosional yang kuat dari publik dan penyelenggara (Malai, 2024). Di sisi lain, kebutuhan Thailand adalah penghormatan terhadap statusnya sebagai pusat budaya regional dan kohesi identitas nasional (*Thainess*). Klaim budaya dari Kamboja dirasakan sebagai tindakan tidak hormat yang mengancam kebanggaan nasional (Prachatai, 2024). Kasus kontestan berdarah campuran Thai-Kamboja, Naruemol Phimphakdee, menjadi titik temu yang paling tajam dan personal dari kedua kebutuhan nasional yang saling berbenturan ini. Ketika Naruemol, seorang warga negara Thailand yang lahir dan besar di provinsi Buri Ram, maju untuk mewakili Phuket di Miss Universe Thailand 2025 (The Nation, 2025a), ia tidak disambut dengan dukungan penuh. Sebaliknya, warisan Kamboja dari ibunya menjadi senjata bagi sebagian warganet untuk menyerang legitimasinya.

Serangan daring yang mempertanyakan haknya untuk mewakili Thailand adalah manifestasi paling jelas dari kebutuhan Thailand akan "identitas yang koheren" yang terancam. Bagi sebagian kalangan nasionalis, tubuh Naruemol adalah "*border line*" yang kabur, perpaduan darah Thai dan Khmer dalam dirinya dianggap "mencemari" kemurnian representasi bangsa (The Nation, 2025a). Kehadirannya di panggung nasional menjadi ancaman simbolis terhadap narasi identitas *Thainess* yang tunggal dan definitif. Kasus Naruemol secara dramatis menunjukkan betapa sensitif dan personalnya kebutuhan ini. Konflik tidak lagi hanya tentang kuil atau kostum, tetapi telah merasuk ke dalam pertanyaan paling mendasar tentang siapa yang berhak disebut "orang Thailand". Tubuhnya menjadi arena proksi di mana kecemasan nasional tentang kemurnian etnis, loyalitas, dan sejarah dipertaruhkan, membuktikan bahwa pada lapisan terdalam, konflik ini adalah pertarungan sengit atas kebutuhan untuk diakui dan rasa memiliki.

C. Implikasi Keamanan dan Reaksi Komunitas Regional Asia Tenggara

Implikasi dari konflik ini tentu paling terasa secara langsung oleh kedua negara yang terlibat, namun gaungnya juga dirasakan di seluruh komunitas regional. Bagi Kamboja, eskalasi

konflik proksi ini secara langsung tumpah dari ranah budaya ke ranah keamanan fisik. Bukti konkretnya adalah penundaan kontes Miss Universe Cambodia 2025 (Missosology, 2025). Ajang yang seharusnya menjadi perayaan kebanggaan nasional dan *platform* diplomasi budaya terpaksa dibatalkan karena alasan keamanan akibat meningkatnya ketegangan di perbatasan dengan Thailand. Penundaan ini terjadi setelah konflik perbatasan kembali memanas pada Juli 2025, yang melibatkan bentrokan militer, jatuhnya korban jiwa, dan pengungsian warga sipil. Keputusan untuk menunda acara internasional sebesar ini menunjukkan bahwa "perang" simbolis di media sosial dan panggung kontes kecantikan memiliki konsekuensi yang nyata. Hal ini menciptakan iklim ketidakpastian dan ketakutan yang menghambat interaksi normal dan merusak potensi ekonomi dari pariwisata dan penyelenggaraan acara, yang merupakan pukulan telak bagi upaya Kamboja untuk membangun citra positif di panggung dunia.

Dampak paling signifikan bagi industri *beauty pageant* Thailand adalah krisis kredibilitas dan kerusakan merek (*brand damage*). Serangkaian perseteruan publik yang dikelola secara buruk, tidak hanya dengan Kamboja tetapi juga dengan para pemenangnya sendiri, telah mengekspos sisi gelap dari bisnis ini. Tuduhan eksplosif dari mantan pemenang MGI 2024, Rachel Gupta, yang mengklaim bahwa advokasi "Stop the War" hanyalah "fasad" karena "tidak menghasilkan uang" dan bahwa para ratu dipaksa untuk "menjual produk murahan di TikTok seperti gadis penjual," telah merusak inti dari citra merek MGI (Panwar, 2025). Organisasi ini berisiko dianggap sebagai *platform* yang eksploitatif dan sinis, bukan sebagai panggung pemberdayaan.

Sebagai negara adidaya dalam *beauty pageant*, reaksi awal penggemar Filipina terbelah. Banyak yang terbiasa dengan standar produksi yang tinggi, awalnya bersimpati pada klaim "tidak profesional" dari MGI. Namun, narasi ini berubah secara dramatis menjadi kebanggaan nasional dan pembenaran ketika perwakilan mereka, CJ Opiaza, mewarisi mahkota setelah pemenang asli mengundurkan diri. Fokus dengan cepat beralih untuk merayakan kemenangan MGI pertama bagi Filipina, yang secara efektif meminggirkan sengketa Thailand-Kamboja dari wacana mereka (Afinidad-Bernardo, 2025). Hal ini menunjukkan keterlibatan yang bersifat oportunistik dan berpusat pada kepentingan nasional.

Dengan industri kontes kecantikan yang berkembang pesat dan semakin komersial (Do, 2022), wacana penggemar Vietnam cenderung lebih analitis. Mereka berfokus pada implikasi bisnis dan kerusakan pada merek MGI. Banyak yang membandingkan insiden tersebut dengan keberhasilan Vietnam menjadi tuan rumah kontes internasional, membingkainya sebagai pelajaran tentang profesionalisme bagi semua pihak yang terlibat (VietNamNet, 2025). Sementara itu, reaksi penggemar Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah sengketa budaya mereka sendiri dengan Malaysia, terutama terkait klaim atas warisan budaya seperti batik (Zi, 2018). Terdapat simpati yang signifikan terhadap posisi Kamboja, dengan banyak yang menafsirkan insiden tersebut melalui lensa perampasan budaya dan sikap tidak hormat oleh tetangga yang lebih kuat. Wacana di forum-forum sering kali berisi peringatan tentang bahaya arogansi budaya di kawasan yang beragam ini.

D. Meraba Langkah Potensial guna Penyelesaian Efektif

Analisis menggunakan *Onion Analogy Framework* menunjukkan bahwa solusi yang hanya berfokus pada lapisan terluar (*Positions*) pasti akan gagal. Resolusi yang berkelanjutan menuntut intervensi yang mampu menembus hingga ke lapisan kepentingan (*Interests*) dan, yang terpenting, memenuhi lapisan kebutuhan (*Needs*) yang fundamental. Setidaknya terdapat tiga langkah potensial yang dapat ditempuh oleh berbagai aktor untuk de-eskalasi dan transformasi konflik.

Pertama, diplomasi *multitracks*, yang menjadi penting untuk meredakan ketegangan budaya yang gagal ditangani melalui diplomasi formal (*Track I*) (Akindoyin, 2024). Pendekatan *Track II* dan *III*, yang melibatkan aktor non-pemerintah, sangat krusial (Fisher et al., 2023). Kedua negara, Thailand dan Kamboja, dapat membentuk Komisi Sejarah dan Budaya Bersama untuk mendalami akar budaya bersama dan memetakan pengaruh timbal balik, yang dapat mengurangi narasi "pencurian budaya." Selain itu, program pertukaran budaya seperti festival seni dan residensi seniman dapat membangun jembatan pemahaman antar rakyat kedua negara, mempromosikan rasa hormat dan keamanan ontologis dengan merayakan identitas budaya bersama.

ASEAN juga perlu mengadaptasi pendekatan lebih aktif dalam menangani konflik identitas yang bersifat transnasional. Dengan merevitalisasi Pilar *Sosio-Cultural Community* ASEAN (ASCC), ASEAN dapat mendirikan Dewan Mediasi Warisan Budaya ASEAN untuk memfasilitasi dialog dan menawarkan rekomendasi terkait sengketa budaya antar negara anggota (Indrawan, 2016). Selain itu, pengembangan kerangka kerja literasi digital regional menjadi sangat penting untuk melawan disinformasi dan nasionalisme digital, yang menjadi pendorong konflik (Hartawan & Nurhayati, 2025). Program pendidikan literasi digital ini dapat meningkatkan pemikiran kritis di kalangan pemuda Asia Tenggara dan mencegah dampak destruktif "perang warganet."

Peran masyarakat sipil, terutama komunitas penggemar *beauty pageant*, sangat signifikan dalam meredakan ketegangan. Dengan mengalihkan energi mereka dari "perang penggemar" (Forward, 2024), menjadi gerakan perdamaian, seperti kampanye yang merayakan perwakilan kedua negara, mereka dapat mengubah dinamika kompetisi menjadi kolaborasi. Penggemar juga dapat menuntut akuntabilitas dari penyelenggara kontes untuk tidak mengeksploitasi sentimen nasionalis demi keuntungan komersial, sehingga mendorong etika yang lebih bertanggung jawab dalam industri ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontroversi dalam industri kontes kecantikan dan klaim budaya antara Thailand dan Kamboja merupakan manifestasi dari konflik identitas historis yang lebih dalam. Dengan menerapkan *Onion Analogy Framework*, penelitian ini mengungkap bahwa di balik posisi publik yang keras, terdapat persaingan strategis atas pengaruh budaya, serta perjuangan kedua negara untuk memenuhi kebutuhan fundamental akan keamanan identitas, pengakuan, dan martabat nasional. Fenomena ini menitikberatkan pada keterbatasan arsitektur keamanan regional, khususnya "*The ASEAN Way*", dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang berakar pada dinamika sosial-budaya dan nasionalisme digital. Studi ini merekomendasikan agar analisis keamanan di Asia Tenggara melampaui sengketa teritorial dan mulai mempertimbangkan konflik identitas di ranah budaya populer, yang semakin mengancam stabilitas regional.

Hubungan antara *beauty pageant* dan nasionalisme terbukti simbiotik, dengan konflik politik yang sudah ada sebelumnya antara Thailand dan Kamboja menemukan panggung baru di arena ini. Struktur kompetisi antarnegara dalam *beauty pageant* tidak hanya merefleksikan ketegangan politik, tetapi juga mengkomersialkannya, memperkuat siklus ketegangan yang ada. *Beauty pageant* ini menjadi *platform* yang sangat terlihat bagi konflik politik untuk diekspresikan, memperburuk dan memperluas dampak ketegangan tersebut, serta mengintensifkan konflik dengan membawa isu-isu ini ke audiens yang lebih luas dan lebih terlibat secara emosional.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memasukkan ranah budaya dalam studi keamanan kawasan, sebagai faktor yang semakin signifikan dalam memperburuk atau memperluas konflik di Asia Tenggara.

DAFTAR REFERENSI

- Afinidad-Bernardo, R. M. (2025). *CJ Opiaza to bag Philippines' first-ever Miss Grand International crown*. <https://www.philstar.com/lifestyle/fashion-and-beauty/2025/05/29/2446718/cj-opiaza-bag-philippines-first-ever-miss-grand-international-crown>.
- Akindoyin, D. I. (2024). International Relations in the 21st Century: The Role of Track-Two Diplomacy in Conflict Resolution. *Perspective Politice*, 17, 5–18. <https://doi.org/10.25019/perspol/24.17.1>.
- Ciorciari, J. D. (2014). Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the *Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*. *American Journal of International Law*, 108, 288–295. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.108.2.0288>.
- Do, L. (2022). *Pageants ignite debate between idealization and commercialization of women's bodies*. VnExpress International. <https://e.vnexpress.net/news/trend/pageants-ignite-debate-between-idealization-and-commercialization-of-womens-bodies-4515747.html>.
- Elfia, F. (2014). PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA MELALUI MEKANISME ASEAN*). *Masalah-Masalah Hukum*, 43, 57–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.57-66>.
- English, K. (2025). *Thai-Cambodian Traditional Dress Sparks UNESCO Heritage Debate*. <https://www.khaosodenglish.com/featured/2025/07/09/thai-cambodian-traditional-dress-sparks-unesco-heritage-debate/>.
- Fisher, R., Tadevosyan, M., & Cuhadar, E. (2023). *The USIP Learning Agenda: An Evidence Review Track 2 Dialogues*. United State Institute of Peace.
- Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2007). *Working with conflict: Skills and strategies for action*. Zed Books.
- Forward, F. (2024). *The Best Organizing Strategy You've Never Heard Of: Why Fan Activism Has the Power to Radically Change Our World*. <https://commonslibrary.org/the-best-organizing-strategy-youve-never-heard-of-why-fan-activism-has-the-power-to-radically-change-our-world/>.
- Hartawan, M., & Nurhayati, S. (2025). Digital Literacy Education: The Role of Language in Resolving Communication Conflicts on Social Media. *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran*, 5. <https://doi.org/10.51574/jrip.v5i1.2578>.
- Horng, P. (2025). *Miss Grand International strips Pich Votey Saravody of title for "ethical violations"* - *Khmer Times*. <https://www.khmertimeskh.com/501731519/miss-grand-international-strips-pich-votey-saravody-of-title-for-ethical-violations/>.
- Indrawan, J. (2016). ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) in Conflict Prevention: The Role of Civil Society Organizations (CSOs). *Journal of ASEAN Studies*, 4. <https://doi.org/10.21512/jas.v4i2.1787.g1746>.
- Malai, Y. (2024). *Miss Grand International Shifts to Thailand After Controversy with Cambodian Organisers*. <https://kiripost.com/stories/miss-grand-international-shifts-to-thailand-after-controversy-with-cambodian-organisers>.
- Miss Grand International Organization. (2025). *ABOUT MGI • MISS GRAND INTERNATIONAL*.

-
- MISS GRAND INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED.
<https://missgrandinternational.com/about-mgi/>.
- Missosology. (2025). *Postingan Missosology*. <https://www.facebook.com/missosology/posts/-miss-universe-cambodia-2025-has-been-cancelled-and-postponed-the-new-date-will-/1180948470735737/>.
- Ousa, R. (2024). *Row Erupts After Cambodia Loses Pageant*. <https://www.cambodianess.com/article/row-erupts-after-cambodia-loses-pageant>.
- Panwar, S. (2025). *Rachel Gupta cries, shares truth about Miss Grand International: "Made to sell cheap products on TikTok like salesgirl" | Fashion Trends*. Hindustan Times. <https://www.hindustantimes.com/lifestyle/fashion/rachel-gupta-cries-clip-shares-truth-about-miss-grand-international-made-to-sell-cheap-products-on-tiktok-like-salesgirl-101748505036394.html>.
- Prachatai. (2024). *Exploring the longstanding cultural tug-of-war between Thailand and Cambodia*. <https://globalvoices.org/2024/12/28/exploring-the-longstanding-cultural-tug-of-war-between-thailand-and-cambodia/>.
- Rosdalina, I. (2025). *Sejarah dan Kronologi Eskalasi Ketegangan antara Thailand dan Kamboja*. PT Tempo Inti Media. <https://www.tempo.co/internasional/sejarah-dan-kronologi-eskalasi-ketegangan-antara-thailand-dan-kamboja-2050769>.
- Suwardi, P. P. (2019). *Understanding femininity in beauty pageant industry: a case study of Puteri Indonesia Pageant*. <https://digital.car.chula.ac.th/cgi/viewcontent.cgi?article=9882&context=chulaetd>.
- Thai PBS World. (2025). *Cambodian beauty queen loses title after criticising Miss Grand International*. <https://world.thaipbs.or.th/detail/cambodian-beauty-queen-loses-title-after-criticising-miss-grand-international/58444>.
- The Nation. (2025a). *Thai-Cambodian pageant challenges ethnic prejudice, inspires national identity debate*. null. <https://www.nationthailand.com/life/entertainment/40051744>.
- The Nation. (2025b). *Thai dress sparks Unesco row as Cambodia asserts cultural claim*. <https://globalnation.inquirer.net/283902/thai-dress-sparks-unesco-row-as-cambodia-asserts-cultural-claim>.
- VietNamNet. (2025). *Vietnam's pageant scene faces scrutiny from performing arts chief*. <https://vietnamnet.vn/en/vietnam-s-pageant-scene-faces-scrutiny-from-performing-arts-chief-2418236.html>.
- Zi, T. M. (2018). *Malaysian pageant finalist's 'batik' dress sparks anger among Indonesians*. Malay Mail. <https://www.malaymail.com/news/life/2018/10/15/malaysian-pageant-finalists-batik-dress-sparks-anger-among-indonesians/1683005>.
-